

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PONOROGO

Marisa Eka Pangestu, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif Hartono

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email Korespondensi : marisa.sari30@yahoo.com

Dikirim : 09-10-2019

Diterima : 17-10-2019

ABSTRACT

The Government of Ponorogo Regency has a mission that is directly related to bureaucratic reform, especially related to financial management issues as outlined in the Regional Medium-Term Development Plan which includes improving the quality of human resources, SPI and also the use of Information Technology, especially in financial management. This study aims to determine the effect of the quality of human resources, internal control systems using information technology on the quality of financial reports in SKPD Ponorogo Regency, both partially and simultaneously .. The method used in this study is a quantitative method, in determining the sample of researchers using techniques Purposive sampling as many as 84 respondents and using multiple regression analysis methods with the classic assumption test, data quality test, f test, t test and coefficient of determination. financial reports in the Regional Government Work Unit (SKPD) of Ponorogo Regency Government. This condition implies that improving the quality of human resources has been able to improve the quality of financial resources. Testing on the third hypothesis concluded that information technology had no effect on the quality of financial reports in the Regional Work Unit (SKPD) of Ponorogo Regency Government. Simultaneously, the quality of human resources, internal control systems and the use of information technology jointly influence the quality of financial reports in the regional work units (SKPD) of the government with the value obtained R^2 of 0.335.

Keywords: HR Quality, Internal Control, Information Technology, SKPD Finance.

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki misi yang berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat perbaikan kualitas SDM, SPI dan juga Penggunaan Tehnologi Informasi khususnya dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Ponorogo baik secara parsial maupun simultan.. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 84 responden dan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik, uji kualitas data, uji f, uji t dan koefisien determinasi.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini mengandung arti bahwa

peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya keuangan. Pengujian pada hipotesis ketiga disimpulkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Secara simultan Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah dengan nilai diperoleh angka R2 sebesar 0,335.

Kata Kunci : Kualitas SDM, Pengendalian Intern, Tehnologi Informasi, Keuangan SKPD.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik merupakan manifestasi dari aktifitas pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun yang telah direncanakan. Salah satu yang menjadi perhatian khususnya untuk pemerintah khususnya di tingkat kabupaten adalah mengenai keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 185 tahun 2012 tentang roadmap reformasi birokrasi. Terdapat berbagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan yang pernah digunakan oleh pemerintah maupun entitas lain, tapi mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, laporan keuangan dikatakan baik atau berkualitas jika laporan itu memenuhi berbagai karakteristik diantaranya adalah relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat dengan mudah untuk dipahami oleh penggunanya (Yuliani, Dkk. 2010).

Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai salah satu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisiran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah berguna untuk menjaga laporan keuangan pemerintah tetap berkualitas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan fakta di lapangan, untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas seringkali ditemukan adanya berbagai kendala yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni. Selain itu juga disebabkan oleh adanya pengendalian yang lemah dan pemanfaatan teknologi informasi yang rendah. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu penerapan teknologi informasi dan juga pengendalian intern yang baik juga merupakan aspek yang sangat penting mengingat bahwa semua pengerjaan laporan sudah berbasis teknologi informasi semua (Roviyantie, 2011). Ketiga aspek sebagaimana telah dijelaskan memiliki hubungan yang kuat dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Artinya adalah bahwa kebijakan reformasi birokrasi juga harus dibarengi dengan perangkat dan kesiapan yang baik juga.

Berdasarkan temuan yang dirilis oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang juga sebagai auditor eksternal melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang salah satunya mencakup efektifitas sistem pengendalian intern yang diterapkan (Setyaningrum. Dkk. 2014).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi baik secara

parsial maupun secara simultan terhadap Kualitas Laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo.

B. KAJIAN LITERATUR

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan ini merupakan future dari kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan penilaian kinerja maupun kepentingan investasi lainnya (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan yang dimaksud memiliki tujuan diantaranya :

- a. Memberikan info tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan
- b. Memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang ada
- c. Memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mencukupi kebutuhannya;
- d. Memberikan informasi konkrit dan riil tentang posisi keuangan pemerintah yang bersangkutan
- e. Memberikan pemahaman tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan (PP No.24 Th. 2005).

Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Untuk perlakuan akuntansi keuangan daerah penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 Juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, dimana hasil proses akuntansinya adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggaambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan (PP No.24 Tahun 2005).

- b. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggaambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

- c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menganalisis sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PP No.24 Tahun 2005).

- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini menaikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016) pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- a. Relevan

Laporan keuangan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi laporan keuangan bebas dari laporan keuangan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.

Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Notoatmodjo (2010) pengertian kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan keterampilan. Menurut Taliziduhu (2005) sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif dan inovatif dengan menggunakan energy tertinggi seperti *intelligence, creativity dan imagination*, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi, otot dan sebagainya.

Dimensi dan Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Priansa (2014) dan Notoadmodjo (2010) kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan 3 dimensi yang dilihat dari pendidikan dan pelatihan. Dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengajaaaa berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

b. Pelatihan

Pelatihan menurut Rivai (2005) adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Menurut Rivai (2005) pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan diintegrasikan oleh manusia, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaksanaan keuangan.

Tujuan dan Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan SPIP pada PP No. 60 Tahun 2008 mengarah pada 4 tujuan yang akan dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
- c. Pengamanan Aset
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemanfaatan

Pengertian Teknologi Informasi

Pengertian teknologi informasi menurut Mulyadi (2014) adalah mencakup komputer berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Menurut Yuliani (2010) Indikator teknologi informasi terdiri atas :

1) Komputer

Komputer adalah suatu alat elektronik yang mempunyai kemampuan melakukan berbagai tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi.

2) Jaringan Internet

Suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi.

Kerangka Berfikir

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan pada masalah kualitas SDM, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan pelaporan keuangan. Objek penelitian ini adalah petugas akuntansi atau penyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara dengan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). Berdasarkan pada formulasi perhitungan yang telah ditetapkan, maka besar sampel di dalam penelitian ini berjumlah 84 pegawai di SKPD Kabupaten Ponorogo terdiri dari tenaga akuntan dan pemegang kas.

Adapun model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut (Lofian dan Riyoko, 2014):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas laporan keuangan
- a : Konstanta
- b₁-b₃ : Koefisien
- X₁ : Kualitas SDM
- X₂ : Sistem Pengendalian Intern
- X₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- e : Error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,863	3,117		3,164	,002
	Kualitas_SDM	,197	,091	,227	2,165	,033
	Sistem_Pengend_Intern	,317	,096	,341	3,296	,001
	Pemanfaatan_TI	,158	,100	,166	1,577	,119

a. Dependent Variabel: Kualitas_Laporan_Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji regresi sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu $Y = 9.863 + 0,197X_1 + 0,317X_2 + 0,158X_3 + e$. Persamaan regresi tersebut bahwa harga α_1 sampai dengan α_3 bertanda positif. Hal tersebut memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas SDM (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

Nilai konstanta dan koefisien regresi sebagaimana yang ada di dalam tabel di atas mengandung arti bahwa:

1. Konstanta sebesar 9,863 menyatakan bahwa besarnya kualitas laporan keuangan (Y) adalah 9,863 dengan asumsi bahwa kualitas SDM (X1), sistem pengendalian intern (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) bernilai constant
2. Koefisien regresi kualitas SDM (X1), sebesar 0,197 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai kualitas SDM (X1), akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,197.
3. Koefisien regresi sistem pengendalian intern (X2), sebesar 0,317 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai sistem pengendalian intern (X2), akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) yaitu sebesar 0,317.
4. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,158 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai pemanfaatan teknologi informasi (X3) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,158.

Pembahasan

Tabel 4.19 Rekapitulasi Uji Statistik

Hipotesis	Uji Statistik (t)		Keterangan
	T Hitung	T Tabel	
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	.199	1.67943	Ho1 diterima dan Ha1 ditolak

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	1.383	1.67943	Ho2 diterima dan Ha2 ditolak
Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	5.891	1.67943	Ho3 ditolak dan Ha3 diterima
Hipotesis	Uji Statistik F		Keterangan
	F Hitung	F Tabel	
Penengaruh Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	16.197	2.80	Ho4 ditolak dan Ha4 diterima
Uji R²	.615	Hubungan antara variable X dengan Y adalah kuat memberi sumbangan pengaruh sebesar 61,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini	

Pengaruh Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menghasilkan kesimpulan bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak atau Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya nilai t yang lebih kecil jika dibandingkan dengan t tabel.

Hasil uji t sebagaimana telah diuraikan di atas berkaitan erat dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Pertama berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa hampir di semua pertanyaan di dominasi oleh skala 4 yaitu jawaban setuju. Pertama pada sub variabel pengetahuan tentang dasar-dasar akuntansi, *anomaly* dan siklus penyusunan laporan keuangan didominasi oleh skala 4 yaitu setuju dan kemudian jawaban sangat setuju sekali. Hasil jawaban ini menunjukkan bahwa sebenarnya pegawai SKPD memiliki pengetahuan yang baik. Selanjutnya pada sub variabel ketrampilan yaitu kepiawaian dan teknik dalam penyelesaian pekerjaan juga memiliki penyebaran jawaban yang hampir sama dimana skala 4 dan skala 5 mendominasi jawaban. Demikian juga pada sub variabel kemampuan dan juga pengalaman semuanya di dominasi oleh skala jawaban 4 dan 5. Dari seluruh hasil jawaban responden khususnya pada variabel kapasitas Sumber Daya Manusia ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki kapasitas yang mumpuni. Meskipun demikian juga ada skala 3 yaitu yang menjawab netral, serta skala satu dan dua ini menandakan bahwa kapasitas pegawai kaitannya dengan akuntansi sangat kurang.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak menunjukkan lemahnya pemahaman atau kualitas sumber daya manusianya tetapi bias jadi

disebabkan karena jawaban responden pada masalah kualitas laporan keuangan. Hasil analisa data terhadap jawaban responden pada variabel kualitas laporan keuangan ternyata menunjukkan komposisi jawaban yang sama dimana untuk skala 4 dan skala 5 juga didominasi oleh jawaban responden dengan kata lain kondisi ini konstan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Hasil pengujian hipotesis kedua sebagaimana dijelaskan di atas juga telah sesuai dengan kondisi riil yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata hasil jawaban didominasi pada skala besar dengan urutan yang pertama adalah skala 5 sangat setuju kemudian skala 4 setuju dan netral atau skala 3 berada pada urutan ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap sistem pengendalian intern sangat baik di semua sub variabel atau indikator yang digunakan di dalam penelitian. Jawaban responden hampir memiliki pola yang sama baik dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko kegiatan pengendalian sampai dengan informasi dan komunikasi.

Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan juga memiliki argument yang sama dengan hipotesis pertama. Pertama dari sisi jawaban responden diketahui bahwa jawaban pada variabel sistem pengendalian intern memiliki pola dan penyebaran skala yang sama dengan variabel kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa sistem pengendalian intern dalam pelaporan keuangan memiliki porsi yang sedikit artinya sistem informasi pelaporan yang digunakan itu sudah merupakan bentuk dari sistem pengendalian intern. Artinya jika data yang dimasukkan salah maka seketika itu juga akan muncul laporan data anomaly pada sistem informasi yang digunakan. Walaupun sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum diterapkan secara efektif menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variable independen terhadap variable dependen. Uji t dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 24.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menghasilkan kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hasil jawaban responden pada variabel pemanfaatan teknologi informasi didominasi oleh skala 4 yaitu setuju dan skala 5 serta jawaban netral. Meskipun demikian disini terdapat perbedaan dengan jawaban pada dua variabel sebelumnya. Dalam hal ini jawaban tidak setuju ada banyak kemunculan. Ini menandakan bahwa persepsi pegawai terhadap pemanfaatan teknologi informasi belum sama atau terdapat perbedaan yang signifikan atau berarti. Pertama adalah jawaban tentang pemanfaatan teknologi informasi membuat pengerjaan laporan keuangan menjadi efisien dan selanjutnya adalah pertanyaan bahwa teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan masih mengandung jawaban dengan skala kecil atau tidak

setuju. Secara statistik ini juga berbeda dengan konstruksi penyebaran jawaban pada variabel dependen yaitu kualitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan table di atas dapat diketahui nilai F hitung variabel hasil pengujian uji F simultan menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa H_04 ditolak dan H_{a4} diterima atau Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah. Berdasarkan uji R^2 diperoleh angka R sebesar 0,615 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kualitas SDM, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian pada uji hipotesis terakhir ini berkaitan erat dengan hasil uji hipotesis sebelumnya dimana meskipun kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan tetapi selisihnya sangat kecil hal ini terlihat antara t hitung dengan t table memiliki jarak yang tidak begitu lebar.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian untuk membuktikan hipotesis pertama telah disimpulkan bahwa H_01 ditolak dan H_{a1} diterima atau Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini mengandung arti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian untuk membuktikan hipotesis kedua telah disimpulkan bahwa H_02 ditolak dan H_{a2} diterima atau sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik pengendalian intern dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga disimpulkan bahwa H_03 diterima dan H_{a3} ditolak atau pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini mengandung arti bahwa teknologi informasi tidak digunakan secara dominan di dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis keempat disimpulkan bahwa H_04 ditolak dan H_{a4} diterima atau Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah. Selain itu juga diperoleh angka R^2 sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara kualitas SDM, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Ponorogo. Hal ini juga menjelaskan bahwa ketiga variabel memberi sumbangan pengaruh sebesar 33,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Saran

1. Kepada masing-masing SKPD diharapkan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang ada, selain itu diharapkan agar semua pegawai SKPD terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan juga pengalaman atau kepiawaian dalam mengoperasikan teknologi informasi sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu dengan melihat kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan juga pengendalian intern anar SDKP secara khusus. Peneliti perlu mengetahui kesesuaian antara peraturan yang ada dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.
3. Untuk penelitian yang dilakukan secara deskriptif komparatif perlu melakukan pemilihan kelompok sampel yang benar-benar kontras misalnya antara pegawai laki-laki dengan bendahara perempuan, ataupun yang lulus dari pendidikan akuntansi dan yang lulus dari jurusan di luar akuntansi.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tak henti memberikan semangat, dukungan dan doa demi kelancaran terselesainya skripsi ini.
2. Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W, MM, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Pembimbing I yang telah memberi arahan, saran dan petunjuk guna terselesainya skripsi ini
3. Arif Hartono, SE, M. Sa, selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan, bimbingan, saran dan petunjuk guna terselesainya skripsi ini

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada Blu Di Kota Semarang. Eprint Undip Semarang
- Bastian, Indra. 2005 **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Celviana, Rahmawati. 2010. Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern Akuntansi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi. XIII Purwokerto
- Ghozali, Imam. 2009. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang : UNDIP.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, XII, Pontianak.
- Jogiyanto. 2008. **Metodologi Penelitian Sistem Informasi**. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Kasmir. 2012, **Analisis Laporan Keuangan**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kementerian Keuangan. 2011. **Belanja Kualitas Mengawal Program Kualitas**. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Komang, Arianti, Pariardi, 2014. Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng). e-journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1. Vol 2, No 1 Tahun 2014, Hal: 1-10.
- Maflikhah, Nur.2010.Peran Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Kwoledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Sebuah Pengujian Terhadap Teori Difusi Inovasi). Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret.Surakarta

- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Jurnal STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014: 15-32**
- Sutrisno Edy, 2011, **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Cetakan ke -3, Penerbit Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Taliziduhu Ndraha. 2005. **Teori Budaya Organisasi**, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.